



## Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995

Ribut Tulus Rahayu ✉, Jayusman, Ibnu Sodiq

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima Agustus 2016  
Disetujui September 2016  
Dipublikasikan Oktober 2016

*Keywords:*

Conflict, Cina, Jawa.

### Abstrak

Konflik sosial sering terjadi di Indonesia dan mengalami peningkatan secara pesat menjelang berakhirnya Orde Baru. Salah satunya terjadi di Kota Pekalongan pada tahun 1995. Konflik ini melibatkan etnis Tionghoa (Cina) dan pribumi (etnis Jawa). Kondisi masyarakat Pekalongan mayoritas beragama Islam dengan tingkat religiusnya tinggi. Saat seorang Tionghoa dikabarkan telah menyobek Al Qur'an, hal tersebut kemudian memicu kerusuhan yang terjadi selama tiga hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial di Kota Pekalongan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial yang menimbulkan konflik laten di masyarakat Kota Pekalongan. Hal tersebut kemudian menyebabkan kerusuhan pada 22-24 November 1995. Dipicu oleh seorang Cina penderita gangguan jiwa yang menyobek Al Qur'an. Konflik tersebut telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi di masyarakat Pekalongan. Upaya penanganan konflik dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan bersama aparat keamanan, dan tokoh masyarakat.

### Abstract

*Social conflicts often occur in Indonesia and has increased rapidly towards the end of Orde Baru. one of them occurred in Pekalongan 1995. This conflict involves Chinese and Javanese. Moslem Pekalongan society have a good religious. When a Chinese reportedly had torn the Qur'an, it is then triggered riots that occurred during the three days. The results showed that the social conflict in Pekalongan was motivated by several factors, political factors, economic factors and social factors that give rise to latent conflicts in the community Pekalongan. This then led to riots in the 22 to 24 November 1995. Fueled by a Chinese people with mental disorders which tore the Qur'an. The conflict has caused social and economic impact on society Pekalongan. Conflict resolution carried by Pekalongan City Government together with the security forces, and public figures.*

© 2016 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: [sejarah@mail.unnes.ac.id](mailto:sejarah@mail.unnes.ac.id)

## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia seringkali disebut sebagai masyarakat majemuk dengan pandangan pluralisme karena keanekaragaman masyarakat dan kebudayaannya, setidaknya pada masa lampau, kurang berinteraksi satu sama lain karena faktor geografis kepulauan (Syarifuddin, 2006:4). Kemudian Mark Lopez (dalam Coppel, 2003:13) mengatakan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan multibahasa yang beranekaragam dilihat dari sudut pandang etnis dan budaya. Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural yang terdiri dari berbagai etnis, suku dan bahasa.

Keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang sangat bernilai, namun pada sisi lain, hal tersebut memiliki potensi konflik di negara ini. Konflik yang sering muncul akibat keanekaragaman tersebut adalah konflik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Meskipun sebenarnya faktor-faktor penyebab dari konflik tersebut lebih sering disebabkan adanya ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan politik. Secara konseptual, potensi konflik yang besar dalam masyarakat Indonesia yang plural secara demografis maupun sosiologis disebabkan oleh terbelahnya masyarakat ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan identitas kultural (Rahardjo, 2005: 780). Pendapat lain berasal dari Parsudi Suparlan (2003) yang mengatakan bahwa dalam masyarakat plural seperti Indonesia, keanekaragaman suku bangsa telah menghasilkan potensi konflik antar suku bangsa dan antara pemerintah dengan suatu masyarakat suku bangsa.

Konflik SARA yang mengalami peningkatan memberikan indikasi bahwa pemahaman masyarakat Indonesia tentang pluralitas atau kemajemukan budaya masih sangat terbatas. Permasalahan SARA tidak pernah dipahami sebagai kenyataan yang harus dikaji secara rasional, tetapi SARA lebih dilihat sebagai permasalahan yang tidak pernah terjadi

secara nyata. Singkatnya, SARA seharusnya perlu dipahami sebagai wilayah pertikaian yang tidak berhenti, baik dalam bentuk konflik laten maupun konflik manifest.

Konflik antar etnis telah terjadi di hampir semua wilayah Indonesia, namun dipenghujung Orde Baru konflik yang terjadi semakin meningkat jumlahnya. Rahardjo (2005:782) telah merangkum konflik yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 1994-1997, beberapa diantaranya melibatkan etnis Tionghoa sebagai faktor pemicu atau hanya sebagai imbas dari konflik yang terjadi, berikut rincian konflik yang terjadi:

1. Situbondo, Jatim, 10 Oktober 1995: bermula dari perbedaan pendapat antara santri muda dengan seorang kiai senior, karena dianggap melecehkan agama, masyarakat menuntut santri muda itu dihukum mati. Namun, pengadilan hanya memvonis lima tahun penjara, sehingga terjadi amuk massa dengan membakar gereja dan penjarahan toko milik etnis Cina.
2. Sanggau Ledo, Kalbar, 1 Januari 1997: perkelahian antara pemuda etnis Dayak dengan etnis Madura pada malam penyambutan tahun baru yang berbuntut pada aksi balas dendam.
3. Makassar, Sulsel, 15 September 1997: berawal dari terbunuhnya seorang anak berusia sembilan tahun oleh seorang pengidap sakit jiwa keturunan Cina. Akibatnya massa marah, kemudian menyerang dan membakar rumah, toko, tempat hiburan milik etnis Cina dan Vihara.
4. Ambon, Sulsel, 19 Januari 1998: dipicu oleh perkelahian antara pengemudi kendaraan umum dengan penumpang yang akhirnya menjadi perkelahian antar agama.
5. Jakarta, 13 dan 14 Mei 1998: kerusuhan massal yang diikuti oleh penjarahan dan pembakaran tempat-tempat bisnis serta pelecehan seksual terhadap perempuan keturunan Cina.
6. Sambas, kalbar, 21 Februari 1999: bermula dari seorang penumpang angkutan umum yang tidak mau membayar, sehingga terjadi perkelahian yang melukai sopir dari etnis

Dayak yang dilakukan oleh penumpang etnis Madura. Kejadian tersebut berbuntut pada aksi balas dendam etnis Dayak.

7. Batam, Riau, 27 Juli 1999: pertikaian etnis terjadi akibat rebutan penumpang antara warga etnis Flores dengan warga etnis Batak. Pertikaian tersebut akhirnya menjadi kerusuhan massa antara kedua kelompok etnis.
8. Wamena, Irian Jaya, 6 Oktober 2000: penurunan bendera Bintang Kejora oleh aparat Brimob yang mengakibatkan kemarahan penduduk asli Papua.
9. Sampit, Kalteng, 18 Februari 2001: empat anggota dari keluarga etnis Madura dibunuh, diduga pelakunya orang Dayak, kemudian ratusan etnis Madura menyerang satu keluarga etnis Dayak. Ribuan warga etnis Dayak, bahkan dai pedalaman memasuki kota untuk melakukan pembersihan etnis Madura (Rahardjo, 2005: 782).

Terlibatnya etnis Tionghoa di dalam konflik yang terjadi di Indonesia merupakan dampak dari kebijakan pemerintah Orde Baru yang dinilai mendiskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia. Charles Coppel (2003:19) mengatakan bahwa kebijakan kebudayaan pemerintah Orde Baru tidak bersifat multikultural dalam kaitannya dengan etnis Tionghoa. Kebijakan tersebut mengadopsi program asimilasi dengan hanya menunjukkannya terhadap etnis Tionghoa saja. Abdul Muntholib (2008) mengatakan bahwa strategi pembangunan ekonomi Orde Baru yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, telah membuka kesempatan kepada etnis Tionghoa berkiprah dengan maksimal dalam setiap pembangunan ekonomi. Selain itu diskriminasi juga diterapkan dalam bidang pendidikan yaitu menghapus sekolah-sekolah khusus anak-anak Tionghoa tahun 1960-an. Kemudian, menurut pendapat Parsudi Suparlan (2003: 30), pada masa Orde baru, pemerintah memberlakukan berbagai peraturan sebagai cara untuk mengontrol etnis Tionghoa di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut dapat dilihat sebagai diskriminasi hukum terhadap mereka karena dianggap asing dan diragukan

kesetiaannya terhadap negara dan bangsa Indonesia.

Salah satu kerusuhan yang melibatkan etnis Tionghoa dan pribumi terjadi di Kota Pekalongan. Kerusuhan tersebut dipicu oleh seorang warga etnis Tionghoa yang dikabarkan merobek dan mengencingi Al Qur'an pada hari Rabu tanggal 22 November 1995. Berita yang menyebar tersebut mengakibatkan warga etnis Jawa yang mayoritas beragama Islam marah dan melampiaskannya dengan melempari toko-toko dan rumah-rumah milik etnis Tionghoa disepanjang Jalan Hayam Wuruk yang merupakan tempat penyobekan Kitab Suci Al Qur'an dilakukan, meskipun akhirnya diketahui bahwa pelaku penyobekan merupakan penderita gangguan jiwa yang belum lama keluar dari rumah sakit jiwa, namun kerusuhan kembali terjadi dan menimbulkan dampak baik dampak ekonomi maupun sosial. Kerusuhan yang terjadi selama beberapa hari tersebut menjadi isu nasional, karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada kerusuhan yang melibatkan etnis pribumi dan etnis Tionghoa di Kota Pekalongan pada tahun 1995 untuk mengetahui kebenaran dari kerusuhan tersebut.

## METODE

Penelitian tentang Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995 ini menggunakan metode sejarah dalam pengerjaannya. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1968: 32). Secara umum metode sejarah meliputi empat langkah yaitu (a) heuristik atau pengumpulan sumber sejarah sesuai dengan kajian penelitian, (b) kritik sumber, kritik sumber dilakukan untuk mendapatkan keabsahan sumber sejarah yang telah diperoleh, yang kemudian dapat digunakan dengan aman, (c) interpretasi, penafsiran fakta-fakta sejarah agar peneliti terhindar dari subjektivitas, dan (d) historiografi, yaitu penulisan hasil penelitian dalam bentuk sistematis agar mudah dibaca. Sumber sejarah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini meliputi sumber primer dan sekunde. Sumber primer yang digunakan peneliti berupa dokumen

sejaman, meliputi dokumen dari Arsip Daerah Kota Pekalongan, dan surat kabar keluaran sejaman yang diperoleh dari Depo Arsip Suara Merdeka dan wawancara dengan saksi mata konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995. Sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku, artikel, laporan hasil penelitian, serta bahan-bahan yang memuat informasi tentang kajian penelitian. Sumber sekunder ini di dapat dari Perpustakaan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995

Masyarakat Pekalongan mayoritas beragama Islam dengan tingkat religius yang tinggi. Saat pemerintah Orde Baru membagi partai politik kedalam tiga kekuatan yaitu Golkar, PPP dan PDI, mayoritas masyarakat Pekalongan menjadi pendukung partai PPP. Kondisi tersebut kemudian menjadi masalah, yaitu terjadinya persaingan antar masyarakat pendukung PPP dan pendukung Golkar. Bukan rahasia lagi bahwa pada masa Orde Baru telah terjadi fenomena kuningisasi (merujuk pada pendukung partai Golkar), pendukung Golkar atau Golongan Karya ada pada tatanan birokrasi. Akibatnya rasa fanatisme didalam masyarakat meninggi, dan menimbulkan pergeseran dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Pekalongan. Adanya Bakom (Badan Komunikasi) di Kota Pekalongan yang anggotanya berasal dari berbagai etnis tidak dapat menanggulangi gejolak masyarakat pada saat itu karena anggota dari etnis Jawa yang beragama Islam tidak mau ikut campur dalam permasalahan di masyarakat.

Mereka akan ikut menyelesaikan masalah apabila permasalahan yang terjadi menyangkut agama saja (wawancara Eddy, dilakukan pada Senin, 29 Februari 2016 pukul 16:06 WIB, di Jl. Cempaka No. 51 Poncol, Pekalongan Timur). Hal ini disebabkan wawasan etnis Jawa pada saat itu kurang nasional, karena fanatisme terhadap satu partai politik. Penjelasan tersebut

ditegaskan kembali oleh Machmud (wawancara dilakukan pada Sabtu, 26 Februari 2016 pukul 12:03 WIB, di SMP Salafiyah Kota Pekalongan) yang mengatakan sikap fanatik itu masuk ke dalam kehidupan masyarakat Pekalongan. Sebagai contoh, apabila ada selamatan dan ada besek (tempat nasi yang terbuat dari anyaman bambu) mereka selalu menggunakan warna hijau untuk melapisi besek tersebut, karena warna hijau merupakan warna lambing partai PPP. Tidak hanya itu, untuk pembelian bahan bakar, meskipun mereka hendak membeli tiga liter, yang mereka ucapkan adalah satu liter dan diulang hingga tiga kali, hal ini dilakukan karena satu merupakan nomor urut dari partai PPP. Dapat disimpulkan bahwa etnis Jawa yang beragama Islam yang kemudian menjadi pendukung PPP dengan tingkat religius yang tinggi menyebabkan mereka memiliki rasa fanatik yang tinggi.

Permasalahan ekonomi menjadi salah satu penyebab konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995. Hal ini sebabkan karena adanya pergeseran status pengusaha etnis Jawa yang menjadi buruh dari pengusaha etnis Tionghoa pada tahun 1980-an. Akibatnya muncul kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat etnis Jawa di kalangan menengah kebawah. Kecemburuan sosial akibat kesenjangan ekonomi di antara dua etnis tersebut dapat dilihat dengan dirusaknya toko-toko atau tempat usaha milik etnis Tionghoa pada saat konflik terjadi.

Latar belakang sosial juga merupakan penyebab konflik tersebut. Di Kota Pekalongan mayoritas masyarakat etnis Tionghoa merupakan non-muslim. Pada saat terjadi pergeseran status yang dijelaskan pada paragraf di atas, hal tersebut menimbulkan kecemburuan sosial. Dapat digambarkan kondisi sosial masyarakat Kota Pekalongan pada tahun 1995 adalah etnis Tionghoa merupakan orang kaya dan non-muslim, sedangkan etnis Jawa merupakan orang miskin dan Islam. Hal ini tercermin dari pengerusakan rumah ibadah seperti gereja yang mayoritas jemaahnya adalah etnis Tionghoa. Dijelaskan pula oleh Eddy (wawancara dilakukan pada Senin, 29 Februari

2016 pukul 16:06 WIB, di Jl. Cempaka No. 51 Poncol, Pekalongan Timur) banyak etnis Arab di Pekalongan yang kaya tidak pernah menjadi sasaran amuk massa saat ada kerusuhan, begitu juga etnis Tionghoa yang beragama Islam, dia tidak terkena amuk massa saat kerusuhan meskipun tinggal didaerah rawan (tinggal di kawasan etnis Jawa yang beragama Islam).

### **Kronologi Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995**

Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995 di picu oleh seorang etnis Tionghoa bernama Yoe Sing Yoeng berumur 42 tahun kedapatan menyobek Al Qur'an pada Rabu pagi, 22 November 1995. Kejadian tersebut dilihat oleh beberapa orang, salah satunya adalah Alwi dan Esah yang merupakan saksi kejadian penyobekan tersebut. Belakangan diketahui bahwa Ayoeng (panggilan Yoe Sing Yoeng) merupakan penderita gangguan jiwa dan belum lama keluar dari rumah sakit jiwa (Gatra, 2 Desember 1995 dan BAP Tomy Yuwono 1995). Penyobekan dilakukan di Jalan Hayam Wuruk tepatnya depan Toko Sinar Matahari Jl. Hayam Wuruk No. 230 Pekalongan (sekarang menjadi toko Batik Huza). Setelah kejadian itu, semakin siang massa yang berkumpul semakin banyak dan menanyakan siapa yang menyobek Al Qur'an tersebut, setelah mengetahui pelaku penyobekan dan mengetahui bahwa pelaku masuk kedalam toko, massa kemudian mendobrak pintu toko hingga berlubang atau jebol. Pelaku kemudian dibawa ke Polres Kota Pekalongan bersama saksi utama yaitu Alwi saat petugas kepolisian datang ke TKP (BAP Alwi 1995 dan wawancara dengan Alwi pada Sabtu 26 Februari 2016, pukul 13:32 WIB, di SMP Salafiyah Kota Pekalongan).

Malamnya sekitar pukul 21:00 WIB kerusuhan terjadi, massa melampiaskan kemarahannya dengan cara melempari rumah-rumah milik etnis Tionghoa. Pada saat itu, gereja dan vihara juga menjadi sasaran amuk massa. Kerusuhan kembali terjadi keesokan harinya yaitu pada hari Kamis 23 November 1995, sekitar pukul 10:00 WIB, massa kembali melakukan pengrusakan, kali ini yang menjadi

sasarannya adalah Sekolah Masehi (Nurdiyanto, 2004: 51).

Kemarahan massa yang belum reda menimbulkan kerusuhan yang lebih besar pada ahri Jum'at 24 November 1995 tepatnya setelah mengikuti shalat Jum'at, ratusan jamaah Masjid Jami' Pekalongan bererak ke berbagai arah sambil membawa batu (wawancara saksi mata, Sabari pada Jum'at 25 Februari 2016, pukul 14:52 WIB, di Jalan hayam Wuruk, dan Abu Hasan pada Jum'at, 25 Februari 2016, pukul 15:19 WIB, di Sampangan, Pekalongan Timur). Beberapa narasumber mengatakan pada hari Jum'at ada jenazah yang hendak dimakamkan di Sapuro, namun sebenarnya isi keranda tersebut adalah batu yang digunakan untuk melempari bangunan milik etnis Tionghoa (wawancara Machmud pada Sabtu, 26 Februari 2016 pukul 12:03 WIB. Di SMP Salafiyah Pekalongan dan wawancara Dirhamsyah pada Sabtu, 27 Februari 2016, pukul 09:57 WIB. Di Radio Kota Batik Pekalongan).

Beberapa lokasi yang dijadikan sasaran amuk massa adalah sepanjang Jalan hayam Wuruk, Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Sudirman, Jalan Wahidin, Jalan KH. Mansyur, Jalan Merdeka, dan Jalan Sultan Agung, menurut penuturan Abu dan Sabari (wawancara saksi mata, Sabari pada Jum'at 25 Februari 2016, pukul 14:52 WIB, di Jalan hayam Wuruk, dan Abu Hasan pada Jum'at, 25 Februari 2016, pukul 15:19 WIB, di Sampangan, Pekalongan Timur), kejadian tersebut sangat cepat, pemilik toko sepanjang Jalan Hayam Wuruk dengan segera langsung menutup tokonya. Pabrik tekstil Lokatek di Pekalongan Barat dan pabrik tekstil di Kismatek juga tidak lupus dari pengrusakan (Gatra, 9 Desember 1995). Senin Sore, Ayoeng dikabarkan meninggal dunia di sel tahanan, jenazahnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Keraton Pekalongan untuk di otopsi (Suara Merdeka, Rabu 29 November 1995). Untuk membuktikan bahwa Ayeong meninggal wajar, petugas keamanan mempersilahkan para ulama dan tokoh masyarakat Pekalongan menyaksikan jenazah Ayeong di rumah sakit sebelum di otopsi (Suara Merdeka, Kamis 30 November 1995). Setelah kabar kematian

Ayeong, kerusakan tidak terulang kembali, dan kondisi masyarakat Pekalongan kembali normal seperti sebelum adanya kasus penyobekan Al Qur'an.

### **Dampak Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995**

Dampak sosial akibat kerusakan di Kota Pekalongan tahun 1995 adalah timbulnya ketakutan pada masyarakat etnis Tionghoa, karena pada saat itu etnis Tionghoa merupakan sasaran amuk massa. Eddy (wawancara dilakukan pada Senin, 29 Februari 2016 16:06 WIB. Di Jl. Cempaka No. 51 Poncol, Pekalongan Timur) menjelaskan sikap etnis Tionghoa sekarang lebih berhati-hati apabila menyangkut tentang agama sejak kejadian penyobekan Al Qur'an yang dilakukan oleh seorang Tionghoa dan mengakibatkan kerusakan yang menjadikan etnis Tionghoa lain sebagai sasaran kemarahan. Menurut penuturan Dirhamsyah (wawancara dilakukan pada Sabtu, 27 Februari 2016, pukul 09:57 WIB. Di Radio Kota Batik Pekalongan), pasca terjadinya kerusakan petugas keamanan selalu berjaga dan berpatroli hingga masuk ke kampung-kampung. Akibatnya kehidupan mereka tidak lagi leluasa seperti sebelum terjadinya kerusakan. Keadaan tersebut tentu saja menimbulkan kekhawatiran masyarakat, karena berfikir keadaan belum aman karena petugas yang masih berpatroli. Selain itu, adanya pelanggaran HAM kabarnya juga terjadi sebagai akibat dari sebuah kerusakan. Namun karena kurangnya data, Komnas HAM tidak dapat melakukan penyelidikan (Suara Medeka, Jum'at 8 Desember 1995, dan Senin 11 Desember 1995).

Dampak ekonomi akibat kerusakan di kota Pekalongan pada tahun 1995 adalah kerugian yang dialami masyarakat etnis Tionghoa secara material. Amuk massa sejak yang terjadi sejak Rabu, 22 November 1995 dan memuncak pada Jum'at, 24 November 1995 mengakibatkan kerusakan bangunan yang terdiri dari pertokoan, serta rumah-rumah milik etnis Tionghoa. Selama berlangsungnya kerusakan toko-toko sepanjang Jalan Hayam Wuruk terpaksa tutup lebih awal atau bahkan tidak

membuka tokonya takut kerusakan kembali terjadi dan merusak dagangan mereka (wawancara dengan Sabari, dilakukan pada Jum'at, 25 Februari pukul 14:52 WIB. Di Jalan Hayam Wuruk). Dampak lain dari kerusakan selain rusaknya bangunan milik etnis Tionghoa adalah adanya pemerasan terhadap pemilik toko (lihat lampiran nomor 18). Hal tersebut dibenarkan oleh Dirhamsyah (wawancara dilakukan pada Sabtu, 27 Februari 2016, pukul 09:57 WIB. Di Radio Kota Batik Pekalongan), mengatakan bahwa ada oknum yang memanfaatkan situasi pada saat itu. Beberapa oknum dengan sengaja meminta rokok contohnya, kepada etnis Tionghoa dengan alasan agar toko mereka aman.

Selain dampak sosial dan dampak ekonomi, konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan juga memberikan dampak pada masyarakat Kota Pekalongan, yaitu dampak politik. Agar tidak terjadi kerusakan seperti yang terjadi pada 22-24 November 1995, Pemerintah Kota Pekalongan meresmikan lembaga FPBI yaitu Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia. Dalam forum tersebut terdapat para tokoh etnis masyarakat di Kota Pekalongan. Tujuannya adalah ketika terjadi perdebatan di masyarakat, para tokoh tersebut dapat segera menyelesaikan masalah agar tidak berlarut dan memperbesar masalah

### **Penanganan Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995**

Penanganan yang dilakukan untuk meredam konflik sosial di Kota Pekalongan tahun 1995 ditangani oleh Pemerintah Kota Pekalongan, Muspida, aparat keamanan, dan tokoh-tokoh masyarakat. Sekwilda, pada hari yang sama, yakni Kamis 23 November 1995, mengadakan pertemuan dengan para alim ulama untuk membahas masalah yang terjadi di Jalan Hayam Wuruk dan mencari jalan keluar. Kemudian dalam menangani masalah kerusakan tersebut Muspida dibantu oleh ormas-ormas Islam, para ulama, dan tokoh masyarakat menghimbau agar masyarakat tenang serta menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk menjaga keamanan, petugas keamanan

berjaga, bahkan melakukan patrol hingga masuk ke kampung-kampung. Aparat keamanan Pekalongan yang dibantu satuan Batalyon 407 Padmakusuma dari Tegal terus berupaya optimal dan memblokade sejumlah jalan. Untuk mengantisipasi keadaan, selain meningkatkan pengamanan, satuan-satuan aparat keamanan juga sudah mulai memblokade ekstra ketat di Weleri, dekat Kota Kendal, agar massa tidak bergerak ke Semarang yang juga dikenal sebagai daerah rawan. Pengamanan juga dilakukan di sebelah barat Kota Pekalongan hingga ke wilayah tegal, dan bahkan dikembangkan ke perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat (Gatra, 2 Desember 1995).

Penanganan jangka panjang juga dilakukan agar konflik serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Untuk mengatasi masalah antar etnis di Pekalongan, telah didirikan FPBI (wawancara dengan Eddy Dasoeki seorang tokoh Tionghoa yang dilakukan pada Senin, 29 Februari 2016 16:06 WIB. Di Jl. Cempaka No. 51 Poncol, Pekalongan Timur). Organisasi ini dihimpun oleh beberapa tokoh etnis masyarakat di Kota Pekalongan untuk duduk bersama dalam forum tersebut, sehingga apabila terjadi konflik di Masyarakat, diharapkan pada tokoh tersebut dapat menyelesaikan konflik secepatnya. Penanganan dalam bidang sosial yang dilakukan oleh pemerintah adalah perlu diadakannya dialog antar etnis di Kota Pekalongan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dampak konflik yang dirasakan etnis Tionghoa hingga sekarang adalah rasa ketakutan dan khawatir, sehingga dengan adanya dialog antar etnis, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman antar etnis dan memberikan rasa nyaman dan aman bagi semua etnis yang ada di kota Pekalongan. Kemudian dalam bidang keamanan, penanganan yang dilakukan adalah membangun posko keamanan di perempatan dekat Jalan Hayam Wuruk setelah kerusuhan terjadi, untuk mengamankan situasi Kota Pekalongan.

## SIMPULAN

Konflik sosial yang terjadi di Kota Pekalongan pada tahun 1995 dilatar belakangi oleh faktor sosial, ekonomi dan politik. Keadaan tersebut menyebabkan kerusuhan, yang dipicu kabar penyobekan Kitab Suci Al Qur'an oleh seorang etnis Tionghoa, masyarakat etnis Jawa Islam marah dan melakukan pengrusakan. Dimulai pada hari Rabu 22 November 1995 dan mengalami puncaknya pada Jum'at 24 November 1995. Bentuk kerusuhan berupa pengrusakan bangunan-bangunan milik etnis Tionghoa. Kerusuhan tersebut menimbulkan dampak sosial dan ekonomi di masyarakat Kota Pekalongan. Penanganan konflik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan adalah bekerja sama dengan aparat keamanan, serta Muspida dan tokoh masyarakat untuk menghimbau masyarakat agar tidak terpancing emosi terkait kejadian penyobekan Kitab Suci Al Qur'an.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

- Berita Acara Pemeriksaan M. Alwi 1995.
- Berita Acara Pemeriksaan Tomy Yuwono 1995.

### Buku

- Gottschalk, Louis. 1968. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI-Press.
- Nurdiyanto. 2004. *Kerusuhan Di Pekalongan Jawa Tengah 1995-1999*. Yogyakarta: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata.

### Jurnal

- Coppel, Charles. 2003 'Kendala-Kendala Sejarah Dalam Penerimaan Etnis Cina di Indonesia yang Multikulturak'. Dalam *Antropologi Indonesia*. No. 71. Hal. 13-22.
- Muntholib, Abdul. 2008 'Melacak Akar Rasialisme di Indonesia Dalam Perspektif Historis'. Dalam *Forum Ilmu Sosial*. No. 2. Hal. 104-112.
- Rahardjo, Turmono. 2005 'Kebijakan Pemerintah Tentang Etnis Cina'. Dalam *JIAKP*. No. 2. Hal. 780-802.
- Suparlan, Parsudi. 2003 'Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina dalam Masyarakat Majemuk Indonesia'. Dalam *Antropologi Indonesia*. No. 71. Hal. 23-33.

Syarifuddin, Achmad Fedyani. 2006 'Membumikan Multikulturalisme di Indonesia'. Dalam *Etnovisi*. No. 1. Hal. 3-11.

#### **Surat Kabar**

*Suara Merdeka*. 1995a. *Penyobek Al Qur'an Meninggal di Tahanan*. 282. 29 Nov. Hal. 1 dan 15.

-----, 1995b. *Upacara Kremasi Dijaga Ketat: MUI Yakinkan Penyobek Al Qur'an Meninggal*. 283. 30 Nov. Hal. 1 dan 15.

-----, 1995c. *Tentang "Kasus Pekalongan": Ada Kerusuhan, Ada Pelanggaran HAM*. 291. 8 Des. Hal. 20.

-----, 1995d. *Tanpa Data Lengkap, Tak Mungkin Komnas HAM Tangani Kasus Pekalongan*. 294. 11 Des. Hal. 1.

#### **Internet**

Gatra. 1995a. *"Badai" Yoe Telah Berlalu*. 9 Desember. [apakabar@access.digex.net](mailto:apakabar@access.digex.net). (3 Maret 2016).

-----, 1995b. *Rusuh Gara-Gara Orang Gila*. 2 Desember. [apakabar@access.digex.net](mailto:apakabar@access.digex.net). (3 Maret 2016).